



Effect of Government Spending on the Human Development Index 2011 -2021

Leonardo Siahaan^{1*}, Lola Vitaloka S², Mika Jun Fera Br. Limbong³
Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Leonardo Siahaan leonardosiahaan0803@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Government Spending, Human Development Index

Received : 10 October

Revised : 10 November

Accepted: 25 November

©2022 Siahaan, Vitaloka, Limbong:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of government spending on the human development index in North Sumatra. This research uses quantitative research methods, especially research in planning economics. This study uses secondary data with time series data types. Data taken during the period 2011-2021. This study uses data taken from 2011 to 2021 from the results of publications from the North Sumatra Central Statistics Agency (BPS). The analytical method used to analyze the effect of government spending on the human development index uses a simple regression equation model with SPSS version 25 based on the data obtained. The results of the study show that there is a positive and significant influence of government spending on the human development index as evidenced by the value of $t_{count} (10.304) > t_{table} (1.85955)$.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 -2021

Leonardo Siahaan^{1*}, Lola Vitaloka S², Mika Jun Fera Br. Limbong³

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Leonardo Siahaan leonardosiahaan0803@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia.

Received : 10 Oktober

Revised : 10 November

Accepted: 25 November

©2022 Siahaan, Vitaloka, Limbong:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif khususnya penelitian di bidang ekonomi perencanaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data runtutan waktu. Data yang diambil selama kurun waktu 2011-2021. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari tahun 2011 hingga 2021 dari hasil publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia dengan menggunakan model persamaan regresi sederhana dengan SPSS versi 25 berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia terbukti dengan nilai Nilai t_{hitung} ($10,304$) > t_{tabel} ($1,85955$).

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua daerah di seluruh Indonesia. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup dalam satu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan manusia. Mirza (2012) menyatakan IPM mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu: indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yaitu pengeluaran riil per kapita. Indeks pembangunan dan kebijakan ekonomi harus berjalan beriringan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi ketimpangan antara pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan pembangunan manusia yang dilakukan dengan demikian maka pembangunan perekonomian dapat terjadi dengan lebih cepat dan terkontrol dengan baik oleh sumber daya manusia yang memadai apabila kedua hal ini tidak berjalan dengan beriringan antara satu dengan yang lainnya maka proses pembangunan perekonomian yang terjadi tidak akan berjalan dengan lancar dikarenakan pembangunan infrastruktur yang baik namun tidak ditunjang dengan pengelolaan manusia yang memadai akan berakibat pada pembangunan ekonomi yang berjalan dengan lebih lambat dari yang diharapkan.

Tabel 1. Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Utara 2011-2021

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Milliar)	Indeks Pembangunan Manusia
2011	4.611,47	67,34
2012	7.633,63	67,74
2013	7.260,47	68,36
2014	7.808,56	68,87
2015	7.959,17	69,51
2016	9.476,42	70,00
2017	12.518,86	70,57
2018	12.563,39	71,18
2019		

	13.440,32	71,74
2020	12.653,60	71,77
2021	13.749,50	72,00

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa indeks pembangunan manusia Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun 2011-2021. Sementara itu pada tahun 2020 meskipun pandemi covid 19 melanda di negara Indonesia tingkat pembangunan manusia juga meningkat dengan sedikit poin.

Pengeluaran pemerintah merupakan kebijakan fiskal yang berupa tindakan dibuat pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan Menurut Mangkoesoebroto (2016), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal (Sadino Sukirno, 2010) dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terjadi pada Provinsi Sumatera Utara 2021 adalah sebesar 72,00 atau tumbuh 0,32 persen (meningkat 0,23 poin) dibandingkan tahun 2020 tergambar dari meningkatnya pengeluaran pemerintah 0,76 persen dibandingkan 2020 (BPS, 2022). Tinggi rendahnya tingkat IPM tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskalnya dalam hal ini pengeluaran. Instrument kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengalokasian dana atau anggaran melalui APBN/APBD yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan (Budiono,2015). Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, pendidikan dan sebagainya (BPS, 2022). Pada tahun 1990 IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan. Sejak pertama kali dipublikasikan IPM terus mendapat banyak sorotan dan dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Tercatat bahwa UNDP melakukan beberapa kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010. Indonesia juga ikut berpartisipasi dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat data secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbaiki penghitungan

untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain (BPS, 2014: 20): a. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk) b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS). c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran perkapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Pada umumnya IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standart hidup layak. Adapun manfaat IPM yaitu (1) Sebagai indicator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. (2) Penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. (3) Khusus Indonesia, IMP merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut peraturan pemerintah RI 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, memberikan defenisi pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam peraturan pemerintah tersebut ada tiga jenis pelayanan publik kepada masyarakat yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif. Selanjutnya Rostow dan Musgrave (dalam Guritno (2016:170), yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Dalam tahap menengah pembangunan ekonomi, menjelaskan bahwa investasi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. hal ini juga dikembangkan (Wagner) yang menyatakan dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah meningkat.

Menurut (Budiono) pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung. c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada

masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda. Ditambahkan lagi Usmalıadanti (2011) menyatakan pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastuktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah sangat berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia dikarenakan suatu jenis kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah sebagai salah satu langkah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan menuju pertumbuhan ekonomi. Melalui pengeluaran pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta menjaga stabilitas perekonomian (Djunasien dan Hidayat, 2002:90). Ditambahkan lagi Menurut Gupta et. al (1998) dalam Prasetyo dan Zuhdi (2013:615), pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan dan pendidikan dapat membawa efek yang positif bagi human capital, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat pemerataan menjadi salah satu topik utama dan dapat menurunkan kemiskinan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Subana dan sudrajad (2005: 25) penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini di pakai suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendiskripsikan statistic, dan untuk menunjukkan hubungan antar variable dan ada pula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal. Sejalan Menurut Sarmanu (2017) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan menguji teori yang selama ini berlaku benar atau salah. Metode kuantitatif untuk mengukur pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Data dalam penelitian ini menggunakan data runtun waktu (time series).

HASIL PENELITIAN

Model	Variables Entered/Removed ^a		Method
	Variables Entered	Variables Removed	
1	Pengeluaran Pemerintah ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

b. All requested variables entered.

Variable Entered/Removed. Menunjukkan metode regresi linear yang dipilih yaitu enter. Pemilihan metode memungkinkan kita menentukan bagaimana variable independent (Pengeluaran Pemerintah) dianalisis.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.960 ^a	.922	.913	.49476

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah

Table model summary di atas menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi berganda (R) sebesar 0,960 dan juga nilai koefisien determinasi regresi sederhana sebesar 0,922. Artinya 91,3 % Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan melalui variasi nilai variable pengeluaran pemerintah. Sedangkan 8,7 persen dipengaruhi variable yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25.988	1	25.988	106.165	.000 ^b
	Residual	2.203	9	.245		
	Total	28.191	10			

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

b. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah

Table Anova diatas menjelaskan hipotesis regresi sederhana dengan pengambilan keputusan:

Jika nilai signifikansi (Sig) > 0,05 maka H0 diterima

Jika nilai signifikansi (Sig) < 0,05 maka H0 ditolak

Diperoleh nilai Sig (0,000) < 0,05 maka H0 ditolak, jadi variable X (Pengeluaran Pemerintah) berpengaruh terhadap variable Y (Indeks Pembangunan Manusia).

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	64.762	.522		124.057	.000
	Pengeluaran Pemerintah	.001	.000	.960	10.304	.000

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

1. Persamaan Regresi

Pada kolom B diketahui Constant sebesar 64,762 dan Koefisien Regresi Pengeluaran Pemerintah sebesar 0.001. Jadi persamaan regresi $Y = 64,762 + 0,001 X$

Makna persamaan regresi :

- a. Constant (a) sebesar 64,762, artinya bahwa Ketika variable pengeluaran pemerintah adalah 0 maka rata-rata Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64.762 satuan.
- b. Slope regresi sebesar 0.001, artinya jika terdapat kenaikan 1 satuan pada pengeluaran pemerintah (X), maka akan meningkatkan prediksi Indeks Pembangunan Manusia (Y) sebesar 0,001. Koefisien bernilai positif menunjukkan semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka Indeks Pembangunan Manusia cenderung meningkat.

2. Uji Sigfikansi

Pada table Coefiesien diketahui nilai t hitung sebesar 10,304 dengan perolehan t table pada $\alpha = 0,005$ dan db = 8 yakni sebesar 1,85955. Sehingga $t_{hitung} (10,304) > t_{tabel} (1,85955)$, maka H_0 ditolak.

Kesimpulan Nilai $t_{hitung} (10,304) > t_{tabel} (1,85955)$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia. Hipotesis yang diajukan teruji kebenarannya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. karena nilai signifikan pengeluaran pemerintah sebesar 0,000 dan nilai koefisien determinasi regresi sederhana sebesar 0, 922. Artinya 91,3% Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui variable pengeluaran pemerintah di Sumatera Utara. Terdapatnya pengaruh positif dan signifikan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia terbukti dengan nilai Nilai $t_{hitung} (10,304) > t_{tabel} (1,85955)$. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam pengeluaran pemerintah akan menyebabkan peningkatan terhadap indeks pembangunan manusia. Begitu pula sebaliknya, pada saat pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka jumlah indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan dalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia pemerintah harus menyediakan prasarana misalnya pendidikan, kesehatan yang layak dan baik dengan menggunakan biaya yang lumayan besar. Sejalan dengan pendapat Rostow dan Musgrave (dalam Mangkoesobroto 170:2016) bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam menyediakan barang dan jasa public yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini sebagai indicator indeks pembangunan manusia yang lebih baik. Sesuai dengan Hasil peneltian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviansyah, Rosyadi dan Yacoub (2019) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia daerah Sumatera Utara dalam rentang waktu 2011-2021. Selanjutnya pengeluaran pemerintah mempunyai sumbangan pengaruh sebesar 91,3% terhadap investasi daerah Sumatera Utara, sementara 8,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti, jumlah pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, Inflasi, keamanan, dan faktor-faktor lainnya. Hal ini memberikan penjelasan bahwa pengeluaran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.

REKOMENDASI

Saran penulis adalah pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran belanja publik sebagai aset tetap secara efektif dan efisien dengan fokus terhadap sektor pembangunan manusia, terutama kepada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia untuk kualitas hidup yang lebih baik kedepannya. Pertumbuhan ekonomi perlu dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan, terutama kemudahan akses pada masyarakat miskin dalam merasakan prasarana yang disediakan pemerintah dengan kualitas yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktifitasnya yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar. Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika. *Junal Kritis*. ISSN 2579-7875. Volume 4 Nomor 2 E.
- Abdul Halim, Dewi Rahayu, Muzdalifah. 2022. ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDI KASUS KAB/KOTA DAN 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015-2019). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 7, No. 8
- Diah Komariah, Mukhammad Yogiandoro, Alexandra Hukum. 2019. Pengaruh Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*. Vol. 4, No. S1: 523 - 532
- Enni Sari Siregar. 2016 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara. Vol.2 No.2
- Timothy Yosua Mononimbar, Agnes L.Ch.P. Lopian, Krest D. Tolosang. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat

Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 22 No.3

Mangkoesebroto, Guritno.2012. *Ekonomi Publik, Edisi III*. Yogyakarta: BPFE.

Mankiw, N. G. 2007. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.

Noviansyah, Helmi, Rosyadi dan Yarlina Yacoub. 2019. "Kemampuan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Dalam Menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat". *Jurnal Ekonomi Daerah Universitas Tanjungpura, Pontianak*.

<https://sumut.bps.go.id/indicator/13/373/1/realisasi-pendapatan-dan-belanja-pemerintah-provinsi-ribu-rupiah-menurut-kabupaten-kota.html>

<https://sumut.bps.go.id/indicator/26/59/1/indeks-pembangunan-manusia-metode-baru.html>